

KOP SURAT
KEMENTERIAN/LEMBAGA (SATKER)

SURAT PERNYATAAN
Nomor : (1)

Sehubungan dengan pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : (2) Tanggal (3) sebesar Rp.....(4)..... (*dengan huruf*) , yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : (5)
2. Jabatan : Kuasa Pengguna Anggaran
3. Satuan Kerja : (xxxxxx) (6)
4. Kementerian Negara/ Lembaga : (xxx) (7)
5. Unit Organisasi : (xx) (8)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 197/PMK.05/2017, SPM tersebut masuk dalam klasifikasi transaksi besar yang seharusnya didahului dengan penyampaian RPD Harian tingkat Satker / RPD Harian hasil proyeksi ke KPPN;
2. Sehubungan dengan pengajuan SPM tersebut tidak didahului dengan penyampaian RPD Harian tingkat Satker atau RPD Harian hasil proyeksi ke KPPN/sebelum tanggal jatuh tempo RPD Harian/tidak sesuai dengan RPD Harian tingkat Satker atau RPD Harian hasil proyeksi, maka kami bersedia dilakukan penundaan pencairan atas SPM tersebut sesuai ketentuan dengan tanggal SP2D 15 / 10 / 5 hari kerja yang akan datang/pada tanggal jatuh tempo RPD Harian tingkat Satker atau RPD Harian hasil proyeksinya yakni tanggal (10).
3. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran atas Surat Pernyataan ini, maka Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material terhadap segala sesuatu yang terkait dengan pengajuan SPM tersebut yang diajukan ke KPPN (11).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Padangsidimpun, 20XX (1 1)
Kuasa Pengguna Anggaran,

..... (12)
NIP (13)

